

DIPLOMASI INDONESIA DI ASEAN DALAM PENANGANAN COVID-19 PADA TAHUN 2020

Yustitian Bayu Arta dan Anna Yulia Hartati

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email: annayulia@unwahas.ac.id

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang diplomasi Indonesia di ASEAN dalam penanganan covid 19 tahun 2020. Munculnya krisis akibat penyebaran Covid-19 telah memaksa tiap-tiap negara untuk menentukan solusi penanganan yang cepat dan tepat. Adanya keterbatasan masing-masing negara akhirnya memunculkan kerja sama di berbagai bidang. First-track diplomacy pun semakin meningkat, meskipun dilakukan secara virtual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Temuan dari penelitian ini adalah penanganan pandemic covid 19 di Asean melalui KTT ASEAN dan Pemulihan WNI, Pemulihan Ekonomi dan diplomasi vaksin. Tidak ada opsi lain bagi masyarakat internasional untuk menghadapi krisis kemanusiaan akibat Covid-19 selain memperkuat kerjasama internasional. Artinya, diplomasi antar negara antar kawasan menjadi salah satu poin penting dalam upaya penanggulangan krisis akibat Covid-19.

Kata kunci: *Diplomasi Indonesia, penanganan Covid 19, Pemulihan Ekonomi, diplomasi Vaksin*

I. PENDAHULUAN

Terjadinya pandemic Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-CoV-2)/Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyebabkan krisis kesehatan, sosial, ekonomi, dan kepemimpinan yang terjadi secara global. Berdasarkan catatan yang dihimpun dari World Health Organization (WHO), memasuki bulan Agustus 2020 pandemi Covid 19 telah merenggut 728.013 jiwa diseluruh dunia¹ (World Health Organization, 2020). Sejak pandemi covid-19 muncul, tak ada satu pun negara anggota ASEAN yang tidak terkena dampak virus tersebut. Berdasarkan data WHO per agustus 2020, indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus covid-19 terbanyak dibandingkan negara negara lain di kawasan ASEAN dengan 111.455 kasus. Disusul oleh Filipina 103.185 kasus, singapura 52.825 kasus, Malaysia 8.999 kasus, Thailand

¹ <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?adgroupsurvey>, diakses tanggal 19 Mei 2021, pukul 09.00 Wib

3.320 kasus, Vietnam 621 kasus, Myanmar 353 kasus, Kamboja 240 kasus, Brunei Darussalam 141 kasus, dan Laos 20 kasus.

Menghadapi kondisi tersebut, ASEAN sebagai organisasi yang mewadahi kerjasama di Asia Tenggara bersinergi untuk menekan dampak buruk virus corona. Kerjasama dilakukan melalui mekanisme-mekanisme ASEAN, ASEAN+3, hingga kerja sama dengan organisasi lainnya. Berbagai kerjasama tersebut membahas sejumlah hal, antara lain mitigasi di bidang kesehatan, respons di bidang ekonomi, serta langkah di bidang pariwisata dan perjalanan.²

Pentingnya kerjasama indonesia dengan asean

Tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, Virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari, hal tersebut disampaikan oleh Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono. Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Sejak Januari saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia, dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan di China.

Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan, yang ada di sekitar enam bandara. Antara lain Batam, Jakarta, Denpasar, Manado, Makassar. Pemerintah Indonesia merasa sudah cukup melakukan langkah-langkah antisipasi. Antara lain menggunakan Health Alert Card atau Yellow Card, juga Thermal Scanner untuk mengecek suhu tubuh di atas 38,5 derajat Celsius di pintu masuk dan keluar RI.³ Sejauh ini, perhatian masyarakat terpaku pada penyebaran COVID-19 di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan keterangan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi pada tahun 2016, jumlah WNI di luar negeri yang tercatat di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah sebanyak 2,7 juta. Namun angka sebenarnya diperkirakan sekitar 4,3 juta.⁴ Data tersebut sudah tentu

² <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/strategi-asean-merespons-dampak-covid-19>. Diakses pada 12 Februari 2021.

³ <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>. Diakses pada 12 Februari 2021.

⁴ “4,3 Juta WNI Ada di Luar Negeri, Rata-rata Pekerja Migran,” Tirta, 2 November 2016, <https://tirto.id/43-juta-wni-ada-di-luar-negeri-rata-rata-pekerja-migran-b1rn>.

berubah pada tahun 2020. Terlepas dari pertanyaan berapa jumlah tercatat dan riil saat ini, isu yang perlu diperhatikan dengan saksama adalah kondisi WNI di luar negeri di tengah pandemi global COVID-19.

Saat ini, dunia sedang mengalami ancaman keamanan akibat penyebaran virus Covid-19, yang menjadi pandemi global. Seperti MERS, SARS, dan penyakit menular lainnya, Virus Covid-19 telah ditetapkan sebagai ancaman terhadap kesehatan manusia dan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 oleh WHO. Dalam waktu 4 bulan, penyebaran Covid-19 telah mencapai 114 negara di dunia. Dalam pernyataannya, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan bahwa selama dua minggu terakhir terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan sebanyak 13x lipat, dan negara yang terkena kasus meningkat 3x lipat. Pada saat itu, Direktur Jenderal WHO juga menyebutkan bahwa jumlah korban Covid-19 telah mencapai lebih dari 4.000.000 kasus. Dikatakan bahwa jumlah tersebut bisa lebih tinggi dari prediksi, karena masih banyak kasus yang belum terdeteksi. Perubahan status menjadi pandemi ini ditetapkan ketika penyebaran terjadi dengan sangat cepat dari manusia ke manusia di berbagai belahan dunia secara global, hingga mencapai wilayah yang sangat jauh dari pusat wabah.

Terbatasnya pengetahuan tiap negara dalam menekan penyebaran Covid-19, memunculkan kebutuhan tiap negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Semenjak Covid-19 menyebar, terdapat sejumlah pertemuan yang dilakukan, sebut saja KTT Luar Biasa G-20 pada 26 Maret 2020,⁵ Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok Alliance for Multilateralism (AoM) pada 16 April 2020, Video Conference Women Foreign Ministers pada 16 April 2020,⁶ hingga pertemuan Direktur Pelaksana IMF dengan sejumlah blok keuangan global (Arab Monetary Fund, ASEAN+3, dan G-20) pada 21 April 2020.⁷ Pertemuan virtual tersebut dilakukan sebagai Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pertemuan-pertemuan virtual tersebut

⁵ Benny D. Koestanto, "Indonesia Perkuat Solidaritas Global Lawan Covid-19", Kompas.id, 17 April 2020, <https://bebas.kompas.id/baca/internasional/2020/04/17/ri-perkuat-solidaritas-global-lawan-covid-19/>. Diakses pada 12 Februari 2021.

⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Pidato Menteri Luar Negeri: Remarks Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia", Kemlu.go.id, 16 April 2020, <https://kemlu.go.id/portal/idAkun/read/1224/pidato/remarks-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of-indonesia-video-conference-women-foreign-ministers-covid-19-and-gender>. Diakses pada 12 Februari 2021

⁷ Abdul Gafur, "Dunia Bersatu Tangkal Dampak Covid-19 ke Ekonomi Global", Lampost.co, 22 April 2020, <https://www.lampost.co/berita-dunia-bersatu-tangkal-dampak-covid-19-ke-ekonomi-global.html>. Diakses pada 12 Februari 2021

merupakan bentuk kemitraan konkret antarnegara yang harus terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan global, khususnya dalam kondisi tidak normal akibat pandemi Covid-19.

Tidak ada opsi lain bagi masyarakat internasional untuk menghadapi krisis kemanusiaan akibat Covid-19 selain memperkuat kerjasama internasional.⁸ Artinya, diplomasi antarnegara menjadi salah satu poin penting dalam upaya penanggulangan krisis akibat Covid-19. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kerja sama dengan bertukar informasi dan pengembangan riset. Negara-negara Uni Eropa bahkan menyebut diri mereka Tim Eropa untuk penanganan COVID-19 yang menganggarkan 36 miliar Euro atau Rp 627 triliun untuk negara mitra mereka yang memiliki sistem kesehatan dan ekonomi yang rentan.⁹

Sebagai sebuah pandemi global, penanganan Covid-19 membutuhkan kerjasama antara berbagai negara di dunia untuk mencegah penyebarannya. Terkait dengan hal ini, maka seiring dengan meningkatnya jumlah penderita Covid-19 di seluruh dunia, maka pemerintah di berbagai negara tidak hanya menetapkan kebijakan lockdown tetapi juga menjalin kerjasama di bidang kesehatan. Negara-negara maju kemudian menawarkan berbagai macam bantuan kesehatan kepada negara-negara berkembang. Indonesiapun melakukan berbagai upaya khususnya di Kawasan Asia Tenggara untuk menekan penularan covid 19. Artikel ini menguraikan upaya apa saja yang dilakukan Indonesia di ASEAN dalam kerangka Kerjasama penanganan Covid 19 di lingkungan Asia Tenggara dengan landasan konsep diplomasi. Diplomasi sebagai kajian keilmuan dari Hubungan Internasional digunakan sebagai salah satu inisiatif mempromosikan negara, meningkatkan eksistensi, atau menyebarkan pengaruh ke negara lain untuk meraih kepentingan nasional bagi masing-masing negara.¹⁰ Diplomasi adalah salah satu alat utama yang digunakan negara dalam pelaksanaan politik luar negeri dan pencapaian

⁸ Benny D. Koestanto, "Indonesia Perkuat Solidaritas Global Lawan Covid-19", Kompas.id, 17 April 2020, <https://bebas.kompas.id/baca/internasional/2020/04/17/ri-perkuat-solidaritas-global-lawan-covid-19/>. Diakses pada 12 Februari 2021.

⁹ <https://theconversation.com/bagaimana-kerja-sama-antarnegara-bisa-membantu-indonesia-dalam-memulihkan-ekonomi-saat-pandemi-145025>.

¹⁰ KM Panikkar, "The Principle and Practice Diplomacy" dalam, "Diplomasi" diterjemahkan oleh Harwanto dan Misrawati (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal 3.

kepentingan nasional yang kemudian bisa menjadi nilai tawar atau *state branding* sebuah negara sehingga juga dapat membangun citra atau *image* dari sebuah negara.¹¹

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi literatur. Data yang diambil oleh penulis dalam hal ini mengacu pada data di beberapa portal online, mengenai diplomasi Indonesia dalam menangani covid – 19, maupun jurnal atau berita pada media surat kabar. Penulis juga melakukan analisis yang berdasar pada observasi pustaka, baik melalui jurnal, buku, maupun media elektronik lainnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan topik tersebut akan menjadi sumber utama dalam penulisan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diplomasi Penanganan Covid - 19 di ASEAN

ASEAN sebagai suatu organisasi di Asia Tenggara mengadakan diplomasi virtual. Meskipun tidak bisa bertemu langsung, komunikasi dan kerjasama internasional terus berjalan. Indonesia melalui ASEAN telah melakukan langkah-langkah diplomasi penting. Sejak pertama kali melanda kota Wuhan Tiongkok pada Desember 2019, Indonesia dan anggota ASEAN telah mendiskusikan wabah virus Corona. Pertemuan - pertemuan daring kemudian dilakukan sampai tingkat para menteri kesehatan anggota ASEAN. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno P. Marsudi misalnya telah melakukan kordinasi melalui percakapan telepon dengan lebih dari 15 Menlu negara sahabat termasuk dari ASEAN. Diplomasi telepon itu mendiskusikan banyak hal seperti perkembangan regional dan isu global terbaru, termasuk catatan pencapaian dan perbandingan dalam usaha bersama melawan pandemi, serta tentu saja saling mengirim support antara Indonesia dan negara sahabat. Indonesia juga telah berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dan konferensi secara virtual di tingkat regional ASEAN¹².

¹¹ Tonny Dian Effendy, “*E-Diplomacy Sebagai Sarana Promosi Potensi Daerah Kepada Dunia Internasional*”. diakses melalui journal.unair.ac.id/filerPDF/4 e-Diplomacy Pemda Indonesia, final edit. Diakses pada 12 Februari 2021.

¹² Purwono, Dr.Andi.”Diplomasi Pandemi RI di ASEAN”.Suara Merdeka, 7 Agustus 2020. Diakses melalui, <https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04143071/diplomasi-pandemi-ri-di-asean?page=all>. Pada 8 Agustus 2021.

A.1. KTT ASEAN

KTT ASEAN merupakan salah satu upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk menangani covid – 19. Dikarenakan kondisi di seluruh negara anggota ASEAN sedang terkena dampak dari covid – 19 tersebut, maka KTT ASEAN di era pandemi ini diselenggarakan secara virtual dan dihadiri oleh seluruh kepala pemerintahan atau kepala negara. Beberapa KTT yang diikuti oleh Indonesia adalah sebagai berikut:

a. KTT Khusus ASEAN dan ASEAN Plus Three

KTT Khusus ASEAN dan ASEAN Plus Three yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (14/4/2020), telah menghasilkan deklarasi berisi tujuh kesepakatan dalam penanganan pandemi global virus corona atau Covid-19. Menlu RI menyatakan bahwa “KTT Khusus ASEAN ini telah menghasilkan sebuah deklarasi. Kalau kita lihat secara garis besar, bahwa deklarasi tersebut memuat adanya tujuh hal atau keputusan. *Pertama*, pentingnya memperkuat kerja sama melawan Covid-19. Antara lain saling tukar informasi, pengalaman terbaik, pengembangan research, pengembangan epidemiologi, dan *clinical treatment*. *Kedua*, pentingnya membuat perlindungan kepada warga di negara-negara ASEAN. “Sekali lagi isu mengenai perlindungan warga negara penting bagi ASEAN dalam masa pandemi ini,” ujar Retno Marsudi. *Ketiga*, memperkuat komunikasi publik serta upaya untuk memerangi stigmatisasi dan juga diskriminasi. *Keempat*, komitmen untuk mengambil langkah bersama dan kebijakan yang terkoordinasi untuk memitigasi dampak ekonomi sosial. Dalam hal ini, menurutnya para pemimpin ASEAN meminta agar para menteri ekonomi di ASEAN dapat mengimpelementasikan hasil pertemuan menteri ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada 10 Maret 2020. “Para *leaders* juga meminta agar para menteri ekonomi ASEAN menindaklanjuti dalam rangka mempersiapkan pada saat pandemi berakhir yaitu pada masa *recovery* nantinya. Dalam konteks dampak sosial ekonomi, para pemimpin ASEAN memberikan perhatian terhadap UMKM dan kelompok rentan lainnya,” jelas Retno Marsudi. *Kelima*, adalah kesepakatan untuk menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan sektor. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN mengapresiasi kerja

ASEAN Coordinating Consul (ACC) yang diketuai Menlu Vietnam dan beranggotakan para Menlu ASEAN serta Kelompok Kerja Kesehatan Publik Darurat ACC. *Keenam*, menugaskan para menteri ekonomi ASEAN untuk memastikannya berjalannya keterhubungan rantai pasokan (supply chain connectivity) sehingga perdagangan dapat terus berjalan. *Ketujuh*, mendukung realokasi *Trust Fund* ASEAN guna membantu ASEAN dalam menangani Covid-19,” ungkap Retno Marsudi.¹³

b. KTT ASEAN Ke – 36

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 Perhimpunan Negara-Negara di Asia Tenggara (ASEAN), pada Jumat (26/6/2020), mengesahkan dua dokumen untuk membangun kekuatan regional dalam menghadapi perubahan akibat pandemi virus corona (Covid-19). KTT ke-36 ASEAN yang berpusat di Hanoi, Vietnam, dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyen Xuan Phuc selaku ketua ASEAN tahun 2020 dan dihadiri sembilan kepala negara ASEAN lainnya secara virtual, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pertemuan selama dua jam, para pemimpin membahas berbagai tantangan yang dihadapi di masa pandemi Covid-19, baik di bidang kesehatan, ekonomi, perdagangan, dan kelanjutan pembangunan di negara-negara ASEAN yang masih berkembang. KTT ini mengesahkan dua dokumen. Dokumen pertama adalah Leaders' Vision Statement on a Cohesive and Responsive ASEAN: Rising above Challenges and Sustaining Growth (Pernyataan Visi Pemimpin tentang ASEAN yang Kohesif dan Responsif: Bangkit di atas Tantangan dan Mempertahankan Pertumbuhan). Dokumen kedua yang disahkan adalah ASEAN Declaration on Human Resources Development for Changing World of Work (Deklarasi ASEAN tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Mengubah Dunia Kerja).

Dalam acara pembukaan, Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi, menyatakan situasi ekonomi ASEAN dalam keadaan tidak baik, namun ASEAN telah mengambil langkah cepat dan menentukan dalam memitigasi

¹³ <https://www.beritasatu.com/dunia/620493/ktt-asean-deklarasikan-tujuh-kesepakatan-penanganan-covid19>. Diakses pada 31 Juli 2021

persoalan bersama dengan mitranya, salah satunya lewat KTT ASEAN Plus Three (ASEAN bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan) pertengahan April lalu. Menurut Retno Marsudi, di tengah tantangan pandemi, Sekjen ASEAN melihat komitmen kerja sama antar negara ASEAN masih sangat kuat, terlepas situasi sulit masing-masing negara. Misalnya, pada bidang kesehatan, ASEAN sepakat untuk membentuk Regional Pandemic Response Fund (Dana Respons Pandemi Kawasan) yang pembahasannya diharapkan bisa segera selesai.

Sekjen ASEAN juga mendorong fasilitasi perdagangan salah satunya lewat ASEAN Single Window (ASW) untuk mengembalikan konektivitas rantai pasokan yang sempat terganggu selama pandemi. “Di dalam konteks pilar ekonomi, rencana penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah indikasi sangat kuat akan upaya keras ASEAN untuk terus mendukung sistem perdagangan multilateral,” kata Retno Marsudi mengutip Lim Jock Hoi. Retno Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo, yang mengikuti KTT ASEAN dari Istana Bogor, meyakini ASEAN mampu melewati masa sulit saat ini karena adanya pondasi kuat yang sudah dibangun selama lima dekade terakhir. Jokowi, ujar Retno, mendorong ASEAN agar memperkuat kerja sama untuk percepatan pemulihan ekonomi.

Menlu RI Retno menjelaskan Presiden Jokowi juga mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN lewat konektivitas barang, jasa, dan para pelaku ekonomi. Jokowi juga mendorong adanya ASEAN travel corridor (koridor perjalanan ASEAN) secara bertahap dimulai dari bisnis esensial berdasarkan protokol kesehatan yang ketat. ASEAN travel corridor selain penting untuk percepatan ekonomi ASEAN, juga menunjukkan arti strategis komunitas ASEAN baik di kawasan maupun dunia internasional.

c. KTT ASEAN Ke - 37

Presiden Joko Widodo menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-37 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11). Tahun ini KTT ke-37 dilaksanakan di Vietnam. Dalam pertemuan ini, Indonesia akan mengusulkan mengenai pemulihan ekonomi di wilayah ASEAN. "Salah satu inisiatif yang diusung oleh Indonesia pada KTT ini adalah upaya membangun komitmen

bersama ASEAN untuk segera membuka konektivitas dan penemuan kegiatan ekonomi di ASEAN melalui ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA)," seperti tertulis dari siaran pers dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (12/11).

ASEAN dalam situasi kenormalan baru. Di dalam KTT juga dibahas mengenai ketersediaan vaksin dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). "Rangkaian KTT utamanya akan membahas langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih luas dari pandemi ini bagi kawasan dengan prioritas kerja sama 2021, khususnya terkait dengan dan produksi vaksin bagi kawasan." "KTT juga akan membahas prioritas pengembangan ekonomi di kawasan dengan mitra untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat Covid-19." Rangkaian KTT ASEAN tahun ini menghadirkan 17 sesi pertemuan. Acara ini dihadiri oleh 10 kepala negara/pemerintahan ASEAN dan 8 kepala negara/pemerintahan negara mitra ASEAN.

Jokowi akan mengikuti lima KTT melalui konferensi video, antara lain KTT Pleno ke-37 ASEAN, KTT ke-23 ASEAN dengan RRT, KTT ke-21 ASEAN dengan Korea Selatan, KTT ke-23 ASEAN dengan Jepang, serta KTT ke-17 ASEAN dengan India. Turut hadir mendampingi Presiden saat menghadiri KTT ke-37 ASEAN secara virtual yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Wakil Tetap RI untuk ASEAN Ade Padmo Sarwono. Retno menuturkan kegiatan ini adalah langkah untuk menanggulangi pandemi secara bersama-sama. "KTT ini penting untuk satukan langkah dan memperoleh komitmen ke depan para pemimpin negara mitra ASEAN untuk mengatasi pandemi secara lebih terstruktur, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan agar tidak menunda dampak dari pandemi yang lebih kompleks bagi situasi dunia dan kawasan.

A2. Perlindungan WNI

Perlindungan WNI menjadi salah satu dari empat prioritas politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, disamping diplomasi untuk peningkatan kerjasama ekonomi. Dapat dikatakan bahwa komitmen pemerintahan RI sedang diuji dengan mewabahnya virus covid-19 yang melanda berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.

a. **Pemulangan WNI**

Pada bulan Pebruari hingga desember lalu, Pemerintah Indonesia telah memulangan lebih dari 20.000 warga negaranya yang terjebak di luar negeri karena berbagai aturan pembatasan dan berpergian akibat pandemi Covid-19. “Hingga 27 Desember 2020, total WNI yang berhasil dipulangan dan difasilitasi kepulangannya ada lebih dari 20.000 dari 62 negara,” kata Kepala Seksi Perlindungan WNI untuk wilayah China Kementerian Luar Negeri RI, Ondy Rakhmat, saat menghadiri seminar virtual, sebagaimana dilihat dari Jakarta, Senin (28/12/2020). Di samping itu, pemerintah juga telah memulangan sekitar 26.000 anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Indonesia yang tidak dapat pulang dan sempat terjebak di luar negeri selama pandemi. Menurut Ondy, kerja perlindungan WNI di luar negeri lebih rumit dan banyak selama pandemi dibandingkan dengan situasi normal, karena COVID-19 mewabah hampir secara bersamaan di lebih dari 200 negara sejak Mei 2020. Data Kementerian Luar Negeri RI, sebagaimana disampaikan Ondy, menunjukkan kasus yang dialami WNI di luar negeri bertambah dua kali lipat selama pandemi Covid-19. “Untuk perlindungan WNI masa pandemi jadi tantangan tersendiri, karena dilihat dari statistik, kasus di luar negeri meningkat pesat. Direktorat Pelindungan WNI-Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI pada 2019 menangani 23.000 kasus dalam setahun. Di masa Covid-19, belum setahun kasus bertambah jadi 43.000 kasus¹⁴. Langkah tersebut diambil menyusul kekhawatiran akan penyebaran penyakit tersebut serta ketidakpastian masa karantina yang mungkin harus dijalani oleh para WNI, yang banyak diantaranya merupakan pelajar dan harus tinggal di kamar asrama masing-masing. Proses perencanaan dan pelaksanaan evakuasi para WNI dari awal bulan Februari hingga desember 2020 tersebut dapat dikatakan tidak mudah, karena tidak hanya membutuhkan kordinasi dari kementrian Luar Negeri dengan berbagai pihak, termasuk KBRI dari pemerintahan masing masing negara yang memiliki regulasinya sendiri, namun juga kesiapan didalam negeri untuk menyediakan lokasi yang mampu menampung para WNI selama mereka menjalani masa karantina.

¹⁴ <https://kabar24.bisnis.com/read/20201228/15/1336290/20000-wni-berhasil-dipulangan-saat-pandemi-covid-19>. Diakses pada 11 Agustus 2021.

Dalam konteks kawasan, perekonomian ASEAN pun terancam rugi manakala Cina sebagai mitra utama mengalami pengeroposan. Meskipun Cina dan USA sedang berkecamuk, namun mereka tetap berkepentingan untuk menjaga akses pasar ke kawasan ASEAN, terlebih Indonesia. Cina adalah salah satu investor dan mitra dagang utama yang ikut mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan skema pinjaman lunak. Sekarang, hubungan itu mengalami gangguan akibat covid-19. Meski begitu, Indonesia tentu akan dilirik sebagai mitra utama baik USA maupun Cina mengingat pangsa pasarnya yang besar ditambah lokasi yang strategis..

b. Pemberian Bantuan

Pemulangan para WNI dari China tersebut ternyata menjadi yang pertama dari upaya-upaya repatriasi bagi para WNI di berbagai negara, untuk kembali pulang ke Tanah Air akibat pandemi virus corona yang terus merebak. Upaya perlindungan bagi para WNI di tengah pandemi covid-19 tak hanya terfokus pada pemulangan kembali ke Indonesia. Perwakilan-perwakilan RI di berbagai wilayah juga memberikan perhatian bagi mereka yang masih tetap berada di luar negeri. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh konsulat Jendral RI di Los Angeles, Amerika Serikat, yang mengunjungi komunitas masyarakat Indonesia di San Diego, California, pada bulan Agustus guna memastikan kondisi para WNI. Selain itu ada pula Sydney, Australia, yang menyalurkan bantuan bagi WNI pemegang visa pelajar dan visa pekerja liburan di area New South Wales, Queensland, dan South Australia pada bulan Juni lalu. Bantuan tersebut diberikan dalam tiga tahap dan berisi sejumlah bahan pokok yang diharapkan dapat sedikit meringankan beban para WNI yang terdampak oleh pandemi Covid-19.¹⁵

Sebanyak 450.860 paket bantuan telah diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) di seluruh dunia yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19. “450.0.860 paket bantuan yang disalurkan melalui perwakilan Indonesia kepada warga negara Indonesia terdampak di berbagai belahan dunia,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Jubir Kemlu

¹⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/1790617/upaya-pemulangan-wni-di-tengah-kabut-pandemi>. Diakses pada 1 Agustus 2021

RI), Teuku Faizasyah dalam konferensi pers daring dengan media, Rabu (3/6/2020). Paket bantuan terbanyak diberikan pada WNI terdampak movement control order (MCO) di Malaysia. Yaitu sebanyak 391.359, mengingat banyak pekerja harian yang terdampak di Malaysia. Selanjutnya, sebanyak 8.928 diberikan pada WNI di negara Asia Pasifik lainnya di luar Malaysia. Perwakilan RI juga memberikan 3.474 paket bantuan kepada WNI di kawasan Eropa, 13.335 bantuan diberikan pada WNI di kawasan Amerika, 38265 paket bantuan diberikan kepada WNI di kawasan Timur Tengah, dan 121 paket bantuan diberikan kepada WNI kita di kawasan Afrika.

Menghadapi new normal, perwakilan RI diseluruh dunia secara aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para WNI secara virtual. Indonesia adalah salah satu negara yang secara aktif mendorong agar berbagai rangkaian penyelenggaraan pertemuan ASEAN tetap berjalan ditengah pandemi. “Semua kegiatan yang berlangsung di ASEAN belakangan termasuk salah satu usul dari Indonesia dalam mensiasati kesulitan interaksi untuk berpergian, dan semua dilakukan dengan negosiasi secara virtual, Jubir Kemlu itu mengatakan saat ini dunia juga tengah mengalami situasi baru, Indonesia dan negara lain pun di dunia menggunakan mekanisme pertemuan secara virtual untuk membahas segala isu.¹⁶

B. Diplomasi Pemulihan Ekonomi

Berdasarkan analisa data yang dikeluarkan oleh The Singapore University of Technology and Design dengan menggunakan metode estimasi pandemi, Susceptible Infected Recovered (SIR) dengan DDE (Data Driven Estimation), maka diperkirakan puncak pandemi di Indonesia telah terjadi pada bulan 19 April 2020 yang lalu dan secara berangsur akan berakhir secara total pada akhir Juli 2020. Data ini dikeluarkan per 5 Mei 2020 yang diambil berdasarkan data dari berbagai negara untuk memprediksi berakhirnya pandemi di dunia. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan akhir Mei 2020 kebijakan PSBB dapat segera berakhir. Dengan demikian, awal Juni seluruh aktifitas dapat berjalan dengan normal.¹⁷

¹⁶ <https://www.tribunnews.com/internasional/2020/06/04/kemlu-ri-450860-paket-bantuan-telah-diberikan-kepada-wni-di-seluruh-dunia>. Diakses pada 25 Juli 2021

¹⁷ <https://money.kompas.com/read/2020/05/10/091500226/perekonomian-indonesia-pasca-pandemi-covid-19?page=all>. Diakses pada 25 Juli 2021

. Di tingkat internasional, kita tetap aktif di forum Organisasi Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non Blok (GNB), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), Female Foreign Ministers, hingga Internasional Coordination Group on Covid-19. Bahkan Indonesia menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Economic and Social Council/ ECOSOC) periode 2021-2023 dan mengetuai presidensi Dewan Keamanan PBB mulai Agustus ini. Forum- forum itu saling menguatkan diplomasi kita yang bertujuan untuk kordinasi, kolaborasi, dan kerjasama dalam berbagai isu terutama menghadapi tantangan Covid 19. Langkah Diplomasi indonesia dalam rangka pemulihan Ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Relokasi Anggaran

Terkait aspek ekonomi, Indonesia menjalankan langkah diplomasi penting di ASEAN. Sejumlah kesepakatan telah dicapai dalam upaya mengatasi dampak krisis ini pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pertama, menyepakati relokasi anggaran kerjasama organisasi sebesar 10 persen untuk digunakan menangani situasi darurat penyebaran virus corona (Covid-19) di ASEAN. Langkah strategis ini disepakati karena biaya penanggulangan wabah tidaklah murah. Kedua, para menteri ekonomi mendapat tugas untuk menindaklanjuti persiapan program ekonomi di saat pandemi berakhir. Mereka juga ditugaskan memastikan berjalannya supply chain connectivitiy (konektivitas rantai pasokan) sehingga perdagangan dapat terus berjalan.

2. ACRF (ASEAN Comprehensive Recovery Framework)

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong kerangka pemulihan ekonomi jangka panjang untuk wilayah Asean dan Global secara menyeluruh pada bidang pangan dan kehutanan. Pemulihan perlu dilakukan mengingat sektor pangan adalah kebutuhan utama yang harus dijaga bersama, terutama dalam situasi pandemi Covid 19. Tantangan pandemi covid- 19. Kasus pertama dan kematian pertama covid di luar Tiongkok ditemukan di ASEAN. Sejak Maret 2020, semua Negara ASEAN juga terpapar pandemi. Saat ini bahkan semua tengah berjuang menghadapi gelombang ketiga Covid-19 yaitu varian delta. Akibatnya dampak sosial ekonomi hingga tekanan politik dirasakan. Terkait diplomasi penanganan pandemi koordinasi lintas pilar dalam implementasi ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) hasil KTT ASEAN ke-36 pada 26

Juni 2020 harus dikongkritkan. Lima strategi harus dijalankan yaitu: meningkatkan sistem kesehatan, memperkuat ketahanan manusia, memaksimalkan potensi pasar intra ASEAN, mempercepat digitalisasi yang inklusif, serta maju menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan.

Di bidang HAM, Dewan Masyarakat Pilar Polkam (APSC) juga harus mendukung peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) di ACRF untuk mengarusutamakan hak asasi manusia. Pemberantasan terorisme juga tidak boleh diabaikan dengan terus mengimplementasikan Bali Work Plan 2019-2025. Menggandeng mitra ASEAN merupakan salah satu solusi. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan posisi strategis kawasan ASEAN+3 sebagai kekuatan ekonomi dunia dioptimalkan perannya.¹⁸

3. TCA (Travel Corridor Arrangement)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin delegasi RI dalam rangkaian pertemuan Menteri Transportasi di ASEAN atau The 26th ASEAN Transport Ministers Meeting (26th ATM) and Associated Dialogue Partner Meetings yang diadakan secara virtual selama dua hari, mulai hari ini, Selasa (24/11) dan besok Rabu (25/11). Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Transportasi dari negara mitra ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Menhub menyampaikan bahwa dalam upaya kembali meningkatkan perekonomian dunia serta konektivitas global, Indonesia telah menetapkan *Travel Corridors Arrangement* (Pengaturan Koridor Perjalanan) yaitu pengaturan koridor perjalanan aman secara bilateral yang sifatnya sementara, untuk memfasilitasi kemudahan perjalanan baik untuk keperluan bisnis, ekonomi, atau diplomatik dari Indonesia ke beberapa negara lain dan juga sebaliknya. “Kami menginformasikan bahwa Indonesia telah menetapkan pengaturan koridor perjalanan dengan beberapa negara di kawasan serta dengan sejumlah negara mitra ASEAN. Langkah ini merupakan salah satu dari sekian banyak langkah yang diambil Indonesia untuk mendukung pemulihan konektivitas global yang kami harap akan berkontribusi pada pemulihan ekonomi dunia. Langkah ini tentu saja dilaksanakan dengan memperhatikan

¹⁸ Purwono, Dr.Andi.”Tantangan Diplomasi Asean. Jateng Tribun News 6 Agustus 2021 diakses melalui <https://jateng.tribunnews.com/2021/08/06/opini-dr-andi-purwono-tantangan-diplomasi-asean?page=2>. Pada 8 Agustus 2021.

protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO dan pemerintah masing-masing negara,” tutur Menhub Budi.

Bandara Soekarno-Hatta mendukung penerbangan aman di dalam skema Travel Corridor Arrangement (TCA) antara Indonesia dengan tiga negara yaitu Uni Emirat Arab, Korea Selatan dan Tiongkok. President Director PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin mengatakan stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta berkoordinasi penuh dalam menyiapkan fasilitas, sarana dan prasarana agar TCA berjalan lancar. “Bandara Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang utama negara memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas Indonesia dengan negara lainnya, dan sejalan dengan itu PT Angkasa Pura II bersama seluruh stakeholder memastikan TCA yang diinisiasikan pemerintah dapat berjalan lancar.” “TCA ini bertujuan untuk memfasilitasi kemudahan perjalanan khusus bisnis, ekonomi, diplomatik dan dinas,” jelas Muhammad Awaluddin¹⁹.

Masih dalam rangkaian pertemuan Menteri Transportasi ASEAN, Menteri Perhubungan turut menghadiri The 19th ASEAN and China Transport Ministers Meeting serta ASEAN Transport Meeting : United States - ASEAN Business Council Consultation. Dalam diskusinya dengan Menteri Transportasi China, Menhub Budi menyampaikan keterbukaan dan kesiapan Indonesia untuk secara aktif bekerjasama dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok khususnya dalam bidang transportasi udara dan laut.

Selain itu, Menhub juga berdiskusi dengan Vice President Policy United States-ASEAN Business Council, dimana Menhub menyatakan menyambut baik keinginan perusahaan swasta di Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam membangun jaringan konektivitas guna meningkatkan perekonomian global dalam masa adaptasi kebiasaan baru serta memulihkan konektivitas antar negara dalam masa pandemi ini. “Saat ini Indonesia telah menerapkan Pengaturan Koridor Transportasi dengan beberapa negara, Indonesia berharap agar dapat membangun lebih banyak pengaturan koridor perjalanan dengan lebih banyak negara termasuk Amerika Serikat, agar dapat meningkatkan kepercayaan penumpang di sektor

¹⁹ <https://covid19.angkasapura2.co.id/blog/travel-corridor-arrangement-dari-bandara-soekarno-hatta-ke-3-negara-direalisasikan--minggu-depan-tambah-ke-singapura>. Diakses pada 9 Agustus 2021.

transportasi udara yang akan mendukung industri perjalanan, pariwisata dan transportasi untuk memulihkan perekonomian global,” tutup Menhub Budi.

4. Indonesia Investment Day 2020

Pada tanggal 22 Juli 2020 KBRI Singapura telah meluncurkan secara virtual “Road to Indonesia Investment Day 2020”. Acara ini merupakan kolaborasi antara KBRI Singapura, Kantor Perwakilan Luar Negeri Bank Indonesia di Singapura, Kantor Perwakilan BKPM di Singapura (IIPC). Acara ini juga diikuti secara daring oleh sekitar 469 peserta melalui zoom dan 340 views melalui youtube, yang terdiri dari Chamber of Commerce yang ada Singapura, media Singapura maupun Indonesia dan perwakilan RI di seluruh dunia. Acara “Road to Indonesia Investment Day 2020” merupakan rangkaian kegiatan “Indonesia Investment Day 2020” yang akan dilaksanakan mulai bulan Agustus hingga Oktober 2020.

Indonesia Investment Day merupakan program unggulan (flagship) tahunan KBRI Singapura sejak tahun 2018 dan telah menarik minat banyak pemangku kepentingan dan investor dari Singapura dan dari banyak negara. Acara “Indonesia Investment Day” secara unik didesain dengan berbagai kegiatan di antaranya yaitu pemberian informasi mengenai proyek-proyek investasi potensial dan business matching yang mempertemukan para investor dan pemilik proyek. Di tengah-tengah situasi pandemik dan tantangan perekonomian dunia saat ini, acara “Indonesia Investment Day” 2020 tetap diselenggarakan secara virtual dengan memanfaatkan momentum yang ada.

Indonesia Investment Day 2020 menghadirkan 11 Provinsi dan lebih dari 80 proyek yang telah dikurasi dengan seksama dan saat ini telah siap untuk menerima investasi dari luar negeri. Proyek-proyek yang ditawarkan bersifat “ready to offer” dan “clean and clear”. Terdapat peningkatan sekitar 30 persen untuk provinsi yang berpartisipasi dan proyek yang ditawarkan. Sementara itu, bidang-bidang investasi yang ditawarkan oleh ke-11 provinsi beragam mulai dari bidang infrastruktur, agribisnis dan pariwisata.

Dalam rangkaian “Indonesia Investment Day 2020” ini akan dilaksanakan 11 webinar yang akan menginformasikan secara detail mengenai proyek-proyek yang ditawarkan masing-masing provinsi. Di dalam webinar tersebut juga disediakan platform one-on-one meeting yang bertujuan untuk memfasilitasi

interaksi investor asing dengan pemilik proyek dan pemerintah daerah, serta untuk merealisasikan investasinya di Indonesia. Hasil kontribusi dari Indonesia Investment Day dapat dilihat dari realisasi kuartal I dan II tahun 2020, nilai investasi Singapura pada kuartal I naik 58 % dari periode yang sama di tahun 2019, dengan nilai USD \$ 2,72 miliar, dan pada kuartal II naik 14 % dari periode yang sama di tahun sebelumnya, senilai USD \$ 1,95 miliar. Acara “Indonesia Investment Day 2020” diharapkan dapat menjadi upaya konkret dalam menjawab tantangan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, dan lebih jauh lagi untuk merespon upaya percepatan pemulihan perekonomian nasional²⁰.

C. Diplomasi Vaksin Covid – 19

Indonesia saat ini sangat aktif melakukan diplomasi dan negosiasi untuk mendapat akses vaksin. Diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Pemerintah tentu dalam rangka untuk memastikan ketersediaan kebutuhan vaksin untuk masyarakat Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang gencar dalam vaksinasi COVID-19. Setidaknya ada 500 ribu orang yang disuntik vaksin setiap harinya. Diharapkan bisa mencapai satu juta per hari dalam beberapa waktu ke depan. Lansia dan mereka yang bekerja di layanan publik menjadi kelompok prioritas. Gerakan vaksinasi secara masif ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan virus COVID-19. Semakin cepat pemberian vaksin, maka diharapkan kekebalan kelompok dapat segera terbentuk. Namun, upaya pemerintah mendapatkan vaksin tidak didapat dengan mudah. Ini mengingat permintaan vaksin di tingkat global sangat tinggi. Semua negara berharap dapat segera mendapatkan suplai dari produsen vaksin. Untuk itu, lobi-lobi gencar dilakukan pemerintah, baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Secara bilateral, Indonesia sejak awal pandemi hingga saat ini terus memonitor dan melakukan pendekatan kepada beberapa negara produsen vaksin seperti China, Korsel, India, UEA, Jerman, AS.

Di China, tim lintas sektoral yang melibatkan seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, BUMN, serta KBRI di Tiongkok membangun komunikasi langsung dengan pemerintah China dan beberapa produsen vaksin seperti Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Indonesia pada akhirnya berhasil meraih kesepakatan dengan Sinovac pada Agustus 2020. Dipilihnya Sinovac, bukan tanpa

²⁰ <https://kemlu.go.id/singapore/id/news/8216/road-to-indonesia-investment-day-2020>. Diakses pada 9 Agustus 2021.

alasan. Karena dari sisi teknik memiliki kesamaan dengan yang dipakai oleh Bio Farma. Sampai saat ini, pasokan dari Sinovac masih berjalan dengan lancar. Terakhir pada Senin (31/5/2021), pemerintah kembali mendapat kiriman 8 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk *bulk*. Indonesia juga berupaya melobi Amerika Serikat yang siap mendistribusikan jutaan vaksinya ke negara lain. Pemerintah akan melakukan pendekatan *g to g (government to government)*, sehingga diharapkan bisa berada di *list* negara pertama yang menerima bantuan. Di level tertinggi, Presiden RI Joko Widodo memainkan peran penting dalam membangun komunikasi dengan pemimpin negara-negara lain. Dalam forum global, Presiden Jokowi juga selalu meyakinkan dan menolak segala macam bentuk nasionalisme vaksin.

Kementerian Luar Negeri RI mengungkapkan dua cara Indonesia mendapatkan vaksin corona, yaitu:

1. Kejasama Bilateral dan Multilateral Melalui COVAX

Direktur Kerja Sama Multilateral Kemlu Febrian A Ruddyard menyatakan bahwa vaksin adalah game changer. Ia mengungkapkan Indonesia saat ini mendapatkan kepastian vaksin dari kerja sama multilateral Covax sebesar 20 persen. Oleh karena itu berbagai upaya kata Febrian dilakukan Indonesia untuk memenuhi kapasitas vaksin lainnya. Sebagai contoh beberapa waktu lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri BUMN Erick Tohir berkunjung ke Inggris untuk menjajaki kerja sama penyediaan vaksin. Lebih lanjut dia mengungkapkan selama ini Indonesia sudah berupaya tidak hanya soal bagaimana vaksin bisa diperoleh masyarakat namun juga memastikan vaksin nantinya aman untuk diberikan.

Adapun vaksin yang berasal dari kerja sama multilateral itu kata Febrian akan Indonesia dapatkan dengan harga yang jauh lebih murah. "20 persen ini termasuk negara yang mendapat advanced market commitment, artinya kita dapat harga yang subsidi, lebih murah dari kelompok negara lain yang dianggap sudah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar, kita masih dikategorikan middle lower income country jadi masih bisa disubsidi," tuturnya. Untuk terus mengarusutamakan multilateralisme. Kita juga sepakat memperkuat kerja sama pengelolaan vaksin Covid-19," kata Retno dalam jumpa pers daring, Rabu (14/10). Retno menyatakan kesepakatan itu dicapai setelah dia dan Menteri BUMN, Erick

Thohir, melawat ke Inggris. Pertemuan dengan jajaran pimpinan AstraZeneca, kata Retno, berjalan dengan baik. "Pihak AZ sambut baik permintaan tersebut. Pengiriman pertama diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021 dan akan dilakukan secara bertahap," ucapnya.²¹

Melalui Keppres No. 18 tahun 2020 Pasal 9 dan 10 mengenai Tim Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 dan Perppu No. 1 tahun 2020, Menteri Luar Negeri berperan dalam Tim Pengembangan Vaksin COVID-19. Selain itu Perpres No. 99 tahun 2020 juga telah menyebutkan kerja sama dengan lembaga atau badan internasional seperti *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation* (CEPI) dan *The Global Alliance for Vaccines and Immunization* (GAVI). Dasar hukum inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan diplomasi vaksin untuk percepatan dan kepastian pengadaan vaksin COVID-19 sesuai kebutuhan pemerintah²². Menlu Retno aktif dalam aliansi vaksin internasional atau Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) untuk memperoleh pembagian vaksin secara berkeadilan melalui skema fasilitas COVAX. Pada 8 Mei 2021, Indonesia telah menerima kedatangan, *batch* ketiga fasilitas COVAX. Jumlah vaksin Astrazeneca dalam bentuk vaksin jadi yang tiba 1.389.600 dosis. Total vaksin Astrazeneca yang telah didapat RI dari jalur COVAX mencapai 6.410.500 dosis. Sebagai gambaran, Indonesia membutuhkan 426 juta dosis vaksin untuk memvaksinasi 181 juta warga. Jumlah itu sudah termasuk 15 persen di antaranya buat cadangan.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Pertama, vaksin produksi PT Bio Farma (Persero). Kedua, vaksin produksi AstraZeneca. Ketiga, vaksin China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm). Keempat, Moderna. Kelima, Pfizer Inc. dan BioNTech. Keenam, Sinovac Biotech.

²¹ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201016133044-106-559204/tiga-cara-indonesia-dapatkan-vaksin-corona>, diakses pada 10 agustus 2021

²² <https://igj.or.id/diplomasi-vaksin-covid-19-indonesia-tantangan-akses-publik-atas-vaksin-dan-layanan-kesehatan-berkeadilan/>. Diakses pada 2 Agustus 2021.

Gambar 1



Sumber: detik.com

Dalam kerangka COVAX Advanced Market Commitment (AMC), Indonesia dinilai layak menerima bantuan pembangunan pemerintah (*official development assistance/ODA*) untuk pengadaan vaksin. Mengutip laman GAVI, COVAX AMC bertujuan memastikan agar 92 negara berpenghasilan menengah dan rendah yang tidak mampu sepenuhnya membayar sendiri kebutuhan vaksin COVID-19, akan mendapat akses yang sama seperti negara-negara berpenghasilan tinggi dan swadaya, pada saat bersamaan. Jika GAVI bertugas mengkoordinasi pengadaan vaksin, CEPI bertanggung jawab memantau riset dan pengembangan calon vaksin, maka tugas UNICEF adalah mengkoordinasi pembelian dan pengiriman vaksin ke 140 negara termasuk Indonesia, agar setiap negara memiliki akses yang setara dan terjangkau pada anti virus SARS-CoV-2. Tidak akan ada tanda-tanda pertempuran melawan COVID-19 jika vaksin tak segera ditemukan, tetapi perjuangan akan lebih panjang lagi jika negara-negara tidak memperkuat kerjasama untuk menyelamatkan dunia dari pandemi. Untuk itu, diplomasi dan semangat multilateralisme perlu terus dijalin agar dunia pada akhirnya bisa menaklukkan pandemi COVID-19.²³

Sejauh ini AMC telah mengumpulkan sekitar 700 juta dolar AS dari target modal awal sebesar 2 miliar dolar AS yang dibutuhkan pada akhir 2020. Tujuan COVAX adalah untuk mendapatkan dan mengirimkan 2 miliar dosis vaksin yang disetujui pada akhir 2021. Saat ini COVAX memiliki kandidat vaksin COVID-19 yang menggunakan berbagai teknologi dan pendekatan ilmiah yang

²³ <https://www.antaraneews.com/berita/1794541/diplomasi-indonesia-untuk-penuhi-kebutuhan-vaksin-corona>. Diakses pada 2 Agustus 2021.

berbeda. Melalui inisiatif COVAX, pembelian vaksin COVID-19 jika nanti tersedia, akan dilakukan lewat satu pintu, yaitu dari Divisi Pengadaan UNICEF di Kopenhagen, Denmark (salah satu sarana pengadaan bantuan kemanusiaan terbesar di dunia)

2. Upaya Pengembangan Vaksin Merah-Putih

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, juga mengungkapkan desakan Komisi 9 kepada Pemerintah untuk menjadikan Covid-19 sebagai momentum bagi Indonesia untuk bisa mengimplementasikan Inpres No.6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat-alat kesehatan. Memastikan kemandirian nasional dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bisa ditingkatkan. Untuk itu terkait dengan pengadaan vaksin Komisi 9 mengharapkan agar Indonesia bisa segera memproduksi Vaksin “Merah-Putih” yang walaupun mungkin baru selesai di tahun 2022. Dalam pengembangan Vaksin Merah Putih, pemerintah bekerja sama dengan lima universitas dan dua lembaga. Universitas yang terlibat dalam proses pengembangan vaksin yakni, Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB). Kemudian, Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Direktur Utama (Dirut) Bio Farma, Honesti Basyir, memprediksi izin penggunaan darurat Vaksin Merah Putih terbit pada Maret 2022. "Ditargetkan nanti Maret 2022, terutama vaksin BUMN yang dikembangkan oleh Bio Farma itu sudah mendapatkan EUA dari BPOM²⁴.

Hal lain yang ditekankan oleh Netty terkait dengan pengadaan vaksin, ia menekankan pentingnya pemerintah melakukan komunikasi publik yang baik. Hal ini karena, banyak masyarakat yang terdistorsi dari informasi yang berdampak terhadap respon skeptic dari upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah hari ini. Keterbukaan informasi kepada publik yang harus dilakukan oleh Pemerintah, yaitu: Pertama, tentang kepastian keamanan dari vaksin. Perlu ada penjelasan yang cukup detail dari pemerintah terkait dengan efektivitas dan keamanan vaksin. Pemerintah harus memastikan bahwa vaksin yang dibeli bisa dijamin tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan, sehingga publik bersedia untuk divaksinasi.

²⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/08/17275571/bio-farma-targetkan-produksi-vaksin-merah-putih-dimulai-pada-april-2022>. Diakses pada 6 Agustus 2021

Berdasarkan informasi yang ada hingga hari ini, Pemerintah mengklaim uji klinis tahap ketiga dari Vaksin Sinovac dapat dikatakan aman, karena tidak terjadi hal-hal yang merugikan pada relawan yang menerima vaksinasi. Efek samping ditemukan namun dalam skala kecil dan tingkat ringan pada sebagian sukarelawan. Kedua, soal kemampuan pengadaan vaksin. Untuk mencapai herd immunity, paling tidak pemerintah harus melakukan vaksinasi 70% dari total populasi, dan itu harus dilakukan sebanyak dua kali. Berdasarkan Perpres No. 99 Tahun 2020 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, pemerintah telah menunjuk langsung BioFarma. Tentu kapasitas produksi BioFarma juga terbatas dan harus menggandeng perusahaan lain untuk memperbesar kapasitas produksinya. Terkait dengan ketersediaan vaksin, pada 6 Desember 2020 Pemerintah mengumumkan bahwa sebanyak 1,2 juta dosis Vaksin Sinovac sudah sampai di Jakarta, dan sebanyak 1,8 juta dosis lainnya akan dikirimkan menyusul pada Januari 2021. Ketiga, perlunya transparansi dalam aspek pembiayaan. Soal harga telah menjadi masalah yang cukup sensitive, misalnya kemarin pengalaman dari penetapan harga Rapid test dan PCR. Termasuk keterbukaan informasi mengenai kemampuan anggaran negara untuk menyediakan vaksin untuk seluruh masyarakat secara gratis. Keputusan terbaru dari Presiden Jokowi pada 16 Desember 2020 menyatakan bahwa Pemerintah akan menggratiskan vaksin untuk seluruh masyarakat. Namun, transparansi mengenai harga yang didapat dari perusahaan farmasi juga perlu dibuka, karena ini akan berdampak terhadap beban anggaran keuangan negara. Misalnya, dalam pembahasan Panja Tata Kelola Obat di Komisi 9 juga mencatat besarnya nilai yang harus dibayarkan oleh Pemerintah terkait pembelian bahan baku ke Sinovac yang angkanya bisa mencapai belasan triliyun rupiah. Prosesnya harus transparan, anggaran yang digunakan juga akuntabel.

Pemerintah harus bisa menjelaskan berapa jumlah pembelian, berapa harganya, kemudian ketika diproduksi untuk mencapai “*herd immunity*” dan menurunkan angka kematian Covid-19, vaksinasi menjadi langkah yang amat penting. Majelis Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dr. Sumarjati Arjoso, menyampaikan bahwa Vaksinasi merupakan cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah penularan penyakit. Namun,

pemberian vaksinasi harus dilaksanakan secara hati-hati karena harus memastikan keamanannya (safety) dan efektifitasnya/bermanfaat.

Kementerian Kesehatan telah membuat Grand Design pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Paling tidak vaksinasi dilakukan terhadap 80% dari total populasi. Bahkan, pemerintah telah menetapkan kelompok prioritas dari kegiatan vaksinasi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas sendiri estimasi kebutuhan anggaran pengadaan vaksin Covid-19 yang mencapai Rp.46 triliun hingga Rp.62 triliun, hal itu belum termasuk anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan imunisasi. Dukungan logistic dan distribusi juga menjadi persoalan sendiri. Oleh karena itu, Negara harus bisa mengkomunikasikan kepada semua orang mengenai jaminan tidak adanya diskriminasi terhadap akses terhadap vaksin baik soal harga, distribusi, maupun keterjangkauan.

Gambar 2

SASARAN VAKSINASI COVID-19
Pentahapan Prioritas sesuai dengan ketersediaan vaksin, penduduk dan wilayah berisiko, tahapan pemakaian dan indeks pemakaian

IDEAL : SELURUH PENDUDUK
OPTIMAL : 80% PENDUDUK BERISIKO TERTULAR

Prioritas	Kelompok Prioritas	Jumlah Orang	Kebutuhan Vaksin (Dosis)
1	Garda terdepan : Medis dan Paramedis Contact tracing, pelayanan publik termasuk TNI/Polri, aparat hukum	3.497.737	6.995.474
2	Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), sebagian pelaku ekonomi)	5.624.0106	11.248.020
3	Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat PT)	4.361.197	8.772.3942
4	Aparatur pemerintah (Pusat, Daerah dan Legislatif)	2.305.689	4.611.378
5	Peserta BPJS PBI	86.622.867	173.245.734
	Sub total	102.451.500	204.903.000
	Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya	57.548.500	115.097.000
	Total	160.000.000	320.000.000

Sumber: Presentasi Sumarjati Arjoso Dalam diskusi IGJ “Diplomasi Vaksin Indonesia” (12/11), diambil dari Grand Design/Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Kemenkes 2020

IV. SIMPULAN

Tahun 2020 dunia menghadapi bencana pandemi global Covid-19 dan krisis kesehatan terbesar sejak Perang Dunia ke 2. Untuk mengatasi penyebaran wabah, hampir seluruh dunia menerapkan kebijakan “lockdown” atau penutupan negara atau kota dari migrasi termasuk pembatasan masuknya barang dan jasa. Krisis kesehatan mengakibatkan terhentinya aktivitas sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, bisnis, dan lain lain, yang

mempengaruhi perekonomian nasional secara signifikan. Untuk mencapai tujuan bersama mengatasi Covid-19, sangat diperlukan kerjasama internasional.

Dunia dapat mengatasi krisis ini melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang berfokus mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan penyebaran Covid-19. Sebagai sebuah pandemi global, penanganan Covid-19 membutuhkan kerjasama antara berbagai negara di dunia untuk mencegah penyebarannya. Terkait dengan hal ini, maka seiring dengan meningkatnya jumlah penderita Covid-19 di seluruh dunia, maka pemerintah di berbagai negara tidak hanya menetapkan kebijakan lockdown tetapi juga menjalin kerjasama di bidang kesehatan. Negara-negara maju kemudian menawarkan berbagai macam bantuan kesehatan kepada negara-negara berkembang. Indonesiapun melakukan berbagai upaya khususnya di Kawasan Asia Tenggara untuk menekan penularan covid 19.

Ada tiga upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan Pandemi di ASEAN , yaitu penanganan pandemic melalui KTT ASEAN dan Pemulangan WNI, Pemulihan Ekonomi melalui Relokasi Anggaran, ACRF (ASEAN Comprehensive Recovery Framework), TCA (Travel Corridor Arrangement), Indonesia Ivestment Day 2020 dan diplomasi vaksin yang dilakukan melalui Kerjasama COVAX dan vaksin merah putih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/E- Book:

KM Panikkar, “*The Principle and Practice Diplomacy*” dalam, “Diplomasi” diterjemahkan oleh Harwanto dan Misrawati (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal 3.

Milton C. Cummings, “Cultural diplomacy and the united states goverment: a survey for arts and culture” (2003), Hal 1.

Riyanti Djalante, Laely Nurhidayah, Jonatan Lassa, Hoang Van Minh, Yodi Mahendradhata, Nguyen Thi Ngoc Phuong, Angelo Paolo L Trias, Michelle Ann Miller, Susanti Djalante, Muhammad Sabaruddin Sinapoy. “The ASEAN’s responses to COVID-19: A policy sciences analysis”. 2020.

Jurnal:

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Pidato Menteri Luar Negeri: Remarks Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia”, Kemlu.go.id, 16 April 2020. Diakses pada 12 Februari 2021.

Tonny Dian Effendy, “*E-Diplomacy Sebagai Sarana Promosi Potensi Daerah Kepada Dunia Internasional*”. diakses melalui journal.unair.ac.id/filerPDF/4 e-Diplomacy Pemda Indonesia, final edit. Diakses pada 12 Februari 2021.

<https://kemlu.go.id/portal/idAkun/read/1224/pidato/remarks-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of-indonesia-video-conference-women-foreign-ministers-covid-19-and-gender>. Diakses pada 12 Februari 2021.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Pidato Menteri Luar Negeri: Remarks Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia”, Kemlu.go.id, 16 April 2020. Diakses pada 12 Februari 2021.

“Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),” <https://asean.org/declaration-special-asean-summit-coronavirus-disease-2019-COVID-19/>. Diakses pada 25 Juli 2021.

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1846/berita/indonesia-tawarkan-peluang-investasi-di-sektor-ekonomi-digital-kepada-thailand>. Diakses pada 25 juli 2021

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/2700/berita/pimpin-pertemuan-covax-menlu-dorong-percepatan-distribusi-vaksin-global>. Diakses pada 1 Agustus 2021.

<https://igj.or.id/diplomasi-vaksin-covid-19-indonesia-tantangan-akses-publik-atas-vaksin-dan-layanan-kesehatan-berkeadilan/>. Diakses pada 2 Agustus 2021

Internet:

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/strategi-asean-merespons-dampak-covid-19>. Diakses pada 12 Februari 2021.

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>. Diakses pada 12 Februari 2021.

“4,3 Juta WNI Ada di Luar Negeri, Rata-rata Pekerja Migran,” *Tirto*, 2 November 2016, <https://tirto.id/43-juta-wni-ada-di-luar-negeri-rata-rata-pekerja-migranbln>. Diakses pada 12 Februari 2021.

Benny D. Koestanto, “Indonesia Perkuat Solidaritas Global Lawan Covid- 19”, *Kompas.id*, 17 April 2020, <https://bebas.kompas.id/baca/internasional/2020/04/17/ri-perkuat-solidaritas-global-lawan-covid-19/>. Diakses pada 12 Februari 2021.

Abdul Gafur, “Dunia Bersatu Tangkal Dampak Covid-19 ke Ekonomi Global”, *Lampost.co*, 22 April 2020, <https://www.lampost.co/berita-dunia-bersatu-tangkal-dampak-covid-19-ke-ekonomi-global.html>. Diakses pada 12 Februari 2021.

<https://theconversation.com/bagaimana-kerja-sama-antarnegara-bisa-membantu-indonesia-dalam-memulihkan-ekonomi-saat-pandemi-145025>. Diakses pada 25 juli 2021.

<https://money.kompas.com/read/2020/05/10/091500226/perekonomian-indonesia-pasca-pandemi-covid-19?page=all>. Diakses pada 25 Juli 2021.

<https://www.tribunnews.com/internasional/2020/06/04/kemlu-ri-450860-paket-bantuan-telah-diberikan-kepada-wni-di-seluruh-dunia>. Diakses pada 25 Juli 2021

<https://www.beritasatu.com/dunia/620493/ktt-asean-deklarasikan-tujuh-kesepakatan-penanganan-covid19>. Diakses pada 31 Juli 2021.

<https://www.antaraneews.com/berita/1790617/upaya-pemulangan-wni-di-tengah-kabut-pandemi>. Diakses pada 1 Agustus 2021.

<https://republika.co.id/berita/qilkfx380/kementan-dorong-pemulihan-pangan-di-asean-dan-global>. Diakses pada 1 Agustus 2021.

<https://www.antaraneews.com/berita/1794541/diplomasi-indonesia-untuk-penuhi-kebutuhan-vaksin-corona>. Diakses pada 2 Agustus 2021.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200608/9/1250035/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-menuju-fase-negatif-pada-kuartal-ii>. Diakses pada 2 Agustus 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/08/17275571/bio-farma-targetkan-produksi-vaksin-merah-putih-dimulai-pada-april-2022>. Diakses pada 6 Agustus 2021

Purwono, Dr. Andi. "Tantangan Diplomasi Asean. Jateng Tribun News 6 Agustus 2021 diakses melalui <https://jateng.tribunnews.com/2021/08/06/opini-dr-andi-purwono-tantangan-diplomasi-asean?page=2>. Pada 8 Agustus 2021.

Purwono, Dr. Andi. "Diplomasi Pandemi RI di ASEAN". Suara Merdeka, 7 Agustus 2020. Diakses melalui, <https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04143071/diplomasi-pandemi-ri-di-asean?page=all>. Pada 8 Agustus 2021.

<https://covid19.angkasapura2.co.id/blog/travel-corridor-arrangement-dari-bandara-soekarno-hatta-ke-3-negara-direalisasikan--minggu-depan-tambah-ke-singapura>. Diakses pada 11 Agustus 2021.